



BUPATI LANGKAT

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.1.1- 2157 /BKD/2024

TENTANG

KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Lampiran XCVIII Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 329 Tahun 2024 Tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, dan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 Perihal : Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kabupaten Langkat akan melaksanakan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Langkat akan melaksanakan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 dengan rincian formasi sebagaimana terlampir pada pengumuman ini.
2. Pelaksanaan Seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan surat edaran Plt. Kepala BKN diatas didasarkan pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 347, 348, dan 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024, dan Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024, dengan prioritas kelulusan secara berurutan diberlakukan bagi:
 - a. Pelamar prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023);
 - b. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);
 - c. Tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan data (*database*) BKN; dan
 - d. Tenaga non ASN yang aktif bekerja di Instansi pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi Guru di Instansi Daerah).

3. Jadwal seleksi pengadaan PPPK Formasi Tahun Anggaran 2024 bagi pelamar pada angka 2 huruf a, b, dan c sebagaimana Tabel I. Sedangkan jadwal seleksi pengadaan PPPK bagi pelamar pada angka 2 huruf d sebagaimana Tabel II.

Tabel I

Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024 bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5	Masa Sanggah (*)	2 s.d. 4 November 2024
6	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	5 s.d. 11 November 2024
8	Penarikan data final	12 s.d. 14 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	24 s.d.31 Desember 2024
14	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	10 s.d. 21 Desember 2024
15	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	13 s.d. 28 Desember 2024
16	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	24 s.d. 31 Desember 2024
17	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
18	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

Catatan : Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah sesuai jadwal dari Panselnas

Tabel II
 Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024
 bagi Pelamar Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah
 (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Instansi Daerah)

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah (*)	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan data final	1 s.d. 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	22 s.d. 31 Mei 2025
15	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	25 April s.d. 17 Mei 2025
16	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	30 April s.d. 22 Mei 2025
17	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	22 s.d. 31 Mei 2025
18	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
19	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

Catatan : Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah sesuai jadwal dari Panselnas

Keterangan:

- (*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024
- (**) : Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan
- (***) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB

4. Tata Cara Pendaftaran :
- a. Calon pelamar seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 melakukan pendaftaran secara *online* ke alamat website Portal SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id/>
 - b. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat **petunjuk atau panduan pendaftaran *online*** dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut;
 - c. Calon pelamar seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif/berlaku;
 - d. Untuk melakukan pendaftaran secara *online*, Calon pelamar seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024, wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Nomor Kartu Keluarga;
 - e. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - f. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka calon pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut;
 - g. Calon pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
 - h. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN dapat dilihat atau diunduh pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
5. Adapun untuk syarat dan ketentuan sebagai berikut :
- a. Persyaratan Umum
 - 1) Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
 - 2) Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Pelamar terdiri dari :
 - a. Pelamar prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023);
 - b. eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);
 - c. pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga Non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;

- d. pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
 - e. guru Non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus menerus di unit kerja tempat mengajar saat mendaftar;
 - f. lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 4) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba;
 - 5) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - 6) Tidak berkedudukan sebagai PPPK, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - 8) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - 9) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - 10) Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
 - 11) Calon Pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi/daerah dalam satu periode pelaksanaan seleksi;
 - 12) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
 - 13) Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
 - 14) Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) terlampir;

- 15) Kebutuhan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat dapat dilamar oleh penyandang disabilitas dengan melampirkan :
 - a) Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - b) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
- b. Syarat Administrasi
 - 1) Surat lamaran dibuat dengan tulis tangan rapi dengan tinta hitam atau diketik komputer serta ditandatangani asli dan dibubuhi e-meterai atau meterai tempel Rp. 10.000,- ditujukan Kepada Bupati Langkat di Stabat (format terlampir);
 - 2) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli;
 - 3) Scan Ijazah Asli sesuai kualifikasi pendidikan formasi jabatan (Surat Keterangan Tanda Lulus **tidak berlaku**);
 - 4) Scan Transkrip Nilai Akademik Asli;
 - 5) Surat Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi
 - 6) Surat Pernyataan 5 poin yang berisi tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain yang ditandatangani dan dibubuhi e-meterai atau meterai tempel Rp.10.000,- oleh calon pelamar (*sesuai Anak Lampiran I-d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002*), (format surat pernyataan dapat diunduh dilaman: <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <http://www.langkatkab.go.id>);
 - 7) Pas foto formal terbaru berlatar belakang warna merah;
 - 8) Scan surat keterangan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar minimal 2 tahun berturut-turut untuk jabatan pelaksana, jabatan fungsional terampil dan ahli pertama serta 3 tahun untuk jenjang jabatan fungsional ahli muda yang ditanda tangani oleh kepala unit kerja masing-masing.
 - 9) Scan surat keterangan aktif bekerja minimal 2 tahun berturut-turut untuk jabatan pelaksana, jabatan fungsional terampil dan ahli pertama serta 3 tahun untuk jenjang jabatan fungsional ahli muda yang ditanda tangani oleh kepala unit kerja masing-masing

6. Dasar hukum pelaksanaan seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Langkat yaitu :
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tanggal 12 Juli 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
 - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
 - d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
 - f. Surat Edaran Dirjen GTK Kemendikbud Ristek Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidikan dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024;
 - g. Surat Edaran Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.
7. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN Pada tahun anggaran yang sama yaitu CPNS atau PPPK
8. Sistem Seleksi penerimaan PPPK Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan dari Panitia Seleksi Nasional.

9. Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Seleksi akan diumumkan dengan pengumuman tersendiri.
10. Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Langkat tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum untuk mempermudah kelulusan sebagai PPPK Tahun Anggaran 2024.
11. Kelulusan merupakan hasil ujian seleksi pelamar. Apabila diketahui dan terbukti bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Penentuan pelamar yang lulus seleksi bagi Tenaga Teknis berdasarkan Kepmenpan RB Nomor 347 Tahun 2024 diberlakukan secara berurutan bagi :
 - a. Eks THK-II;
 - b. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah Kabupaten Langkat;
 - c. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah Kabupaten Langkat paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
13. Penentuan pelamar yang lulus untuk jabatan fungsional guru berdasarkan Kepmenpan RB Nomor 348 tahun 2024 diberlakukan secara berurutan bagi :
 - a. guru eks THK-II;
 - b. guru yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah Kabupaten Langkat;
 - c. guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di Instansi Pemerintah Kabupaten Langkat tempat mengajar saat mendaftar;
 - d. lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
14. Penentuan pelamar yang lulus untuk kebutuhan jabatan fungsional tenaga kesehatan berdasarkan Kepmenpan RB Nomor 349 Tahun 2024 diberlakukan secara berurutan bagi :
 - a. Pelamar D-IV Bidan Pendidik
 - b. Eks THK-II;
 - c. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah Kabupaten Langkat;

- d. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah Kabupaten Langkat paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus untuk jabatan pelaksana, jabatan fungsional terampil dan ahli pertama serta paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk jenjang jabatan fungsional ahli muda.
15. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 hanya dapat dilihat dalam website resmi <https://www.menpan.go.id>; <https://bkn.go.id>; <https://sscASN.bkn.go.id/> dan <https://www.langkatkab.go.id>.
 16. Para calon pelamar dan atau pelamar disarankan untuk terus memantau website tersebut diatas untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian.
 17. Apabila calon pelamar dan atau pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PNS, maka Pemerintah Kabupaten Langkat berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, dituntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan akan diproses lebih lanjut oleh pihak yang berwajib.
 18. Setiap tahapan seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024, para pelamar **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun oleh Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Langkat.
 19. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan diumumkan melalui website resmi <https://sscASN.bkn.go.id/> dan <https://www.langkatkab.go.id>.
 20. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2024 dapat menghubungi nomor whatsapp (0857-6077-4808) email bkdlangkat@yahoo.co.id atau bkd.ppi@gmail.com atau datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat pada hari dan jam kerja.
 21. Calon pelamar dan atau pelamar wajib terus memantau jadwal dan persyaratan melalui website resmi diatas, kelalaian pelamar dalam mengikuti informasi atau seluruh proses kegiatan seleksi merupakan tanggung jawab pelamar.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui khalayak umum dan diucapkan terima kasih.

Stabat, 30-9-2024
Pj. BUPATI LANGKAT



Tembusan :

- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta
- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
- Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan

LAMPIRAN PENGUMUMAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 800.1.1.1-2157/BKD/2024

TANGGAL : 30 - 09 - 2024

TENTANG : KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	6
1	GURU AHLI PERTAMA GURU AGAMA ISLAM	Edaran Dirjen GTK Kemendikbud Ristek Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidikan dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	100	DINAS PENDIDIKAN
2	GURU AHLI PERTAMA GURU PPKN	Edaran Dirjen GTK Kemendikbud Ristek Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidikan dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	3	DINAS PENDIDIKAN
3	GURU AHLI PERTAMA GURU MATEMATIKA	Edaran Dirjen GTK Kemendikbud Ristek Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidikan dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	25	DINAS PENDIDIKAN
4	GURU AHLI PERTAMA GURU PENJASORKES	Edaran Dirjen GTK Kemendikbud Ristek Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidikan dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	80	DINAS PENDIDIKAN
5	GURU AHLI PERTAMA GURU AGAMA KRISTEN	Edaran Dirjen GTK Kemendikbud Ristek Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidikan dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	25	DINAS PENDIDIKAN
6	GURU AHLI PERTAMA GURU TIK	Edaran Dirjen GTK Kemendikbud Ristek Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidikan dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	9	DINAS PENDIDIKAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	6
7	GURU AHLI PERTAMA GURU AGAMA KATOLIK	Edaran Dirjen GTK Kemendikbud Ristek Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidikan dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	1	DINAS PENDIDIKAN
8	GURU AHLI PERTAMA GURU KELAS-SD	Edaran Dirjen GTK Kemendikbud Ristek Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidikan dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	614	DINAS PENDIDIKAN
9	GURU AHLI PERTAMA GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	Edaran Dirjen GTK Kemendikbud Ristek Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidikan dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	7	DINAS PENDIDIKAN
10	GURU AHLI PERTAMA GURU BAHASA INGGRIS	Edaran Dirjen GTK Kemendikbud Ristek Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidikan dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	50	DINAS PENDIDIKAN
11	GURU AHLI PERTAMA GURU KELAS-TK	Edaran Dirjen GTK Kemendikbud Ristek Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidikan dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	5	DINAS PENDIDIKAN
12	GURU AHLI PERTAMA GURU BIMBINGAN KONSELING	Edaran Dirjen GTK Kemendikbud Ristek Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidikan dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	43	DINAS PENDIDIKAN
13	GURU AHLI PERTAMA GURU IPS	Edaran Dirjen GTK Kemendikbud Ristek Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidikan dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	3	DINAS PENDIDIKAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	6
14	GURU AHLI PERTAMA GURU SENI BUDAYA	Edaran Dirjen GTK Kemendikbud Ristek Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidikan dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	11	DINAS PENDIDIKAN
15	GURU AHLI PERTAMA GURU IPA	Edaran Dirjen GTK Kemendikbud Ristek Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidikan dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	4	DINAS PENDIDIKAN
16	GURU AHLI PERTAMA GURU BAHASA INDONESIA	Edaran Dirjen GTK Kemendikbud Ristek Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidikan dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	20	DINAS PENDIDIKAN
17	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	D-IV KEBIDANAN / D-IV KEPERAWATAN / S-1 KEPERAWATAN / S-1 KEBIDANAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	2	DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PURA BAGIAN TATA USAHA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
18	APOTEKER AHLI PERTAMA	PROFESI APOTEKER	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KARANG REJO
19	APOTEKER AHLI PERTAMA	PROFESI APOTEKER	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN
20	APOTEKER AHLI PERTAMA	PROFESI APOTEKER	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TANJUNG SELAMAT
21	APOTEKER AHLI PERTAMA	PROFESI APOTEKER	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS STABAT
22	APOTEKER AHLI PERTAMA	PROFESI APOTEKER	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SERAPIT
23	APOTEKER AHLI PERTAMA	PROFESI APOTEKER	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS DESA LAMA

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	6
24	APOTEKER AHLI PERTAMA	PROFESI APOTEKER	1	DINAS KESEHATAN UPT INSTALASI FARMASI
25	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	1	DINAS KESEHATAN UPT INSTALASI FARMASI
26	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TANJUNG LANGKAT
27	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS STABAT LAMA
28	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS STUNGKIT
29	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BUKIT LAWANG
30	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BERAS BASAH
31	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	2	DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PURA BIDANG PENUNJANG MEDIS SEKSI PENUNJANG NON MEDIS
32	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS MARIKE
33	BIDAN TERAMPIL	D-III KEBIDANAN	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PANGKALAN SUSU
34	BIDAN TERAMPIL	D-III KEBIDANAN	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS DESA LAMA
35	BIDAN TERAMPIL	D-III KEBIDANAN	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PANTAI CERMIN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	6
36	BIDAN TERAMPIL	D-III KEBIDANAN	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BAHOROK
37	BIDAN TERAMPIL	D-III KEBIDANAN	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS STUNGKIT
38	BIDAN TERAMPIL	D-III KEBIDANAN	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KUALA
39	BIDAN TERAMPIL	D-III KEBIDANAN	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BERAS BASAH
40	BIDAN TERAMPIL	D-III KEBIDANAN	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS STABAT LAMA
41	BIDAN TERAMPIL	D-III KEBIDANAN	2	DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PURA BIDANG KEPERAWATAN SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN
42	DOKTER AHLI MUDA	SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	1	DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PURA BIDANG PELAYANAN MEDIS SEKSI PELAYANAN MEDIS
43	DOKTER AHLI PERTAMA	PROFESI DOKTER	2	DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PURA BIDANG PELAYANAN MEDIS SEKSI PELAYANAN MEDIS
44	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / D-IV EPIDEMIOLOGI	1	DINAS KESEHATAN UPT LABORATORIUM KESEHATAN
45	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	D-IV EPIDEMIOLOGI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS MARIKE
46	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	D-IV EPIDEMIOLOGI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TANJUNG LANGKAT
47	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / D-IV EPIDEMIOLOGI	1	DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PURA BIDANG PENUNJANG MEDIS SEKSI PENUNJANG MEDIS

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	6
48	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	D-IV EPIDEMIOLOGI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BUKIT LAWANG
49	NUTRISIONIS TERAMPIL	D-III GIZI	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KARANG REJO
50	NUTRISIONIS TERAMPIL	D-III GIZI	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KUALA
51	NUTRISIONIS TERAMPIL	D-III GIZI	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PEMATANG CENGAL
52	NUTRISIONIS TERAMPIL	D-III GIZI	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS STUNGKIT
53	PERAWAT AHLI PERTAMA	PROFESI NERS	2	DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PURA BIDANG KEPERAWATAN SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN
54	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS DESA LAMA
55	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BESITANG
56	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS STUNGKIT
57	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS STABAT
58	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KARANG REJO
59	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PANTAI CERMIN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	6
60	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BERAS BASAH
61	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	2	DINAS KESEHATAN UPT LABORATORIUM KESEHATAN
62	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS GEBANG
63	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BAHOROK
64	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KUALA
65	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS DESA TELUK
66	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TANGKAHAN DURIAN
67	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	2	DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PURA BIDANG KEPERAWATAN SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN
68	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SAWIT SEBERANG
69	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PANGKALAN SUSU
70	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS HINAI KIRI
71	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SECANGGANG
72	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PEMATANG CENGAL
73	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III ILMU REKAM MEDIS / D-III REKAM MEDIK	1	DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PURA BIDANG PENUNJANG MEDIS SEKSI PENUNJANG MEDIS
74	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	3	DINAS KESEHATAN UPT LABORATORIUM KESEHATAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	6
75	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN	2	DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PURA BIDANG PENUNJANG MEDIS SEKSI PENUNJANG MEDIS
76	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TANGKAHAN DURIAN
77	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KARANG REJO
78	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS STABAT LAMA
79	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PANTAI CERMIN
80	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS STUNGKIT
81	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TANJUNG SELAMAT
82	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PEMATANG CENGAL
83	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SECANGGANG
84	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PEMATANG JAYA
85	RADIOGRAFER TERAMPIL	D-III RADIOLOGI	2	DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PURA BIDANG PENUNJANG MEDIS SEKSI PENUNJANG MEDIS
86	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KUALA
87	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS STUNGKIT
88	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS DESA TELUK
89	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BESITANG
90	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SELESAI
91	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS STABAT LAMA
92	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BERAS BASAH
93	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PANGKALAN BRANDAN
94	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KUALA
95	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PEMATANG CENGAL
96	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SECURAI

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	6
97	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SAMBI REJO
98	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN
99	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS STUNGKIT
100	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SEI BAMBAN
101	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SAWIT SEBERANG
102	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PEMATANG JAYA
103	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS MARIKE
104	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PURA BIDANG KEPERAWATAN SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN
105	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN GIGI	1	DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS NAMU UKUR
106	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN INFORMASI PUBLIK
107	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	2	KECAMATAN PEMATANG JAYA SEKRETARIAT KECAMATAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
108	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN PADANG TUALANG SEKRETARIAT KECAMATAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
109	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN KUTAMBARU SEKRETARIAT KECAMATAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
110	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM
111	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN SIRAPIT SEKRETARIAT KECAMATAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
112	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
113	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS KOPERASI SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
114	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
115	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM
116	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM
117	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA	1	DINAS KETENAGAKERJAAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
118	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
119	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN BIDANG PETERNAKAN
120	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
121	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BAGIAN UMUM
122	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	2	DINAS PENDIDIKAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
123	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	2	BADAN PENDAPATAN DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM
124	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS SOSIAL SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN INFORMASI DATA

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	6
125	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
126	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	2	KECAMATAN SAWIT SEBERANG SEKRETARIAT KECAMATAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
127	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN SECANGGANG SEKRETARIAT KECAMATAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
128	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
129	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
130	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN BAHOROK SEKRETARIAT KECAMATAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
131	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PERHUBUNGAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM
132	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN HINAI SEKRETARIAT KECAMATAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
133	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
134	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN ASSET
135	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA	6	SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM
136	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM
137	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM
138	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL
139	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN BRANDAN BARAT KELURAHAN TANGKAHAN DURIAN SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
140	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER / S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN SEI LEPAN KELURAHAN ALUR DUA BARU SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
141	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 SOSIAL / S-1 EKONOMI	1	KECAMATAN KUALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
142	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL / S-1 EKONOMI	1	KECAMATAN HINAI SEKSI TATA PEMERINTAHAN
143	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER / S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN SEI LEPAN KELURAHAN HARAPAN JAYA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
144	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER / S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	2	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
145	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 SOSIAL / S-1 KOMPUTER	1	DINAS SOSIAL BIDANG REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL
146	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER / S-1 SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN PANGKALAN SUSU KELURAHAN BERAS BASAH SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
147	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER	1	KECAMATAN BABALAN KELURAHAN BRANDAN BARAT SEKSI PEMERINTAHAN UMUM

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	6
148	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 KOMPUTER	1	KECAMATAN SALAPIAN KELURAHAN TANJUNG LANGKAT SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
149	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 SOSIAL / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN SEI LEPAN KELURAHAN SEI BILAH SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
150	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 KOMPUTER / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN SELESAI KELURAHAN PEKAN SELESAI SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
151	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER / S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN SEI LEPAN KELURAHAN SEI BILAH TIMUR SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
152	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL POLITIK	3	SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM
153	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
154	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN SALAPIAN SEKSI TATA PEMERINTAHAN
155	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 KOMPUTER / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN STABAT KELURAHAN KWALA BINGAI SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
156	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 KOMPUTER	2	DINAS PERHUBUNGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DAN SUNGAI SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT DAN SUNGAI
157	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 EKONOMI	1	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BIDANG DESTINASI SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN
158	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 KOMPUTER / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN KUALA KELURAHAN BELA RAKYAT SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
159	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA BIDANG BINA KEOLAHRAGAAN
160	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER / S-1 SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN SEI LEPAN KELURAHAN ALUR DUA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
161	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER / S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	2	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
162	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER / S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN BESITANG KELURAHAN PEKAN BESITANG SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
163	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
164	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 KOMPUTER	1	KECAMATAN SEI BINGAI SEKSI TATA PEMERINTAHAN
165	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER / S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUKUM	1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN SUB BIDANG PENCEGAHAN
166	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN SAWIT SEBERANG KELURAHAN SAWIT SEBERANG SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
167	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER / S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	DINAS PENDIDIKAN BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
168	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 KOMPUTER / S-1 HUKUM	1	KECAMATAN STABAT KELURAHAN PAYA MABAR SEKSI PEMERINTAHAN UMUM

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	6
169	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN STABAT SEKSI TATA PEMERINTAHAN
170	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER	1	DINAS KETENAGAKERJAAN BIDANG PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS
171	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN TANJUNG PURA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
172	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN GEBANG KELURAHAN PEKAN GEBANG SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
173	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG SARANA DAN PELAKU DISTRIBUSI
174	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN BRANDAN BARAT SEKSI TATA PEMERINTAHAN
175	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN BABALAN KELURAHAN PELAWI UTARA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
176	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN WAMPU KELURAHAN BINGAI SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
177	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL	1	KECAMATAN BAHOROK SEKSI TATA PEMERINTAHAN
178	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN BESITANG SEKSI TATA PEMERINTAHAN
179	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUKUM	1	KECAMATAN SELESAI SEKSI TATA PEMERINTAHAN
180	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM / S-1 KOMPUTER / S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 ILMU KOMUNIKASI	2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA
181	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN SECANGGANG SEKSI TATA PEMERINTAHAN
182	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 KOMPUTER / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN STABAT KELURAHAN DENDANG SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
183	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN HINAI KELURAHAN KEBUN LADA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
184	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 KOMPUTER	1	KECAMATAN BABALAN KELURAHAN BRANDAN TIMUR BARU SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
185	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN STABAT KELURAHAN STABAT BARU SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
186	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER / S-1 SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN DAERAH SEKSI PENEGAKAN PERATURAN
187	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN SEI LEPAN SEKSI TATA PEMERINTAHAN
188	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 KOMPUTER / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN SECANGGANG KELURAHAN HINAI KIRI SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
189	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN SEI BINGAI KELURAHAN NAMU UKUR SELATAN SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
190	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN STABAT KELURAHAN SIDOMULYO SEKSI PEMERINTAHAN UMUM

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	6
191	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 KOMPUTER	2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BIDANG PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
192	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER / S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN PANGKALAN SUSU KELURAHAN BUKIT JENGKOL SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
193	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN BABALAN SEKSI TATA PEMERINTAHAN
194	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 KOMPUTER	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS
195	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER / S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	DINAS KESEHATAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
196	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN PADANG TUALANG SEKSI TATA PEMERINTAHAN
197	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM / S-1 SOSIAL / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER	1	DINAS KOPERASI BIDANG USAHA KECIL MENENGAH
198	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	2	BADAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN SUB BIDANG PELAYANAN DAN PENETAPAN
199	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN PADANG TUALANG KELURAHAN TANJUNG SELAMAT SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
200	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER / S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN BESITANG KELURAHAN BUKIT KUBU SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
201	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN KUALA KELURAHAN PEKAN KUALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
202	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 SOSIAL / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 KOMPUTER	1	INSPEKTORAT SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM
203	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER	1	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN BIDANG KEARSIPAN
204	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 KOMPUTER / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN BINJAI SEKSI TATA PEMERINTAHAN
205	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER / S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM
206	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN GEBANG SEKSI TATA PEMERINTAHAN
207	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 SOSIAL / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 KOMPUTER	1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK BIDANG BINA KELUARGA BERENCANA
208	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN BRANDAN BARAT KELURAHAN PANGKALAN BATU SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
209	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN PANGKALAN SUSU SEKSI TATA PEMERINTAHAN
210	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN KUTAMBARU SEKSI TATA PEMERINTAHAN
211	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 KOMPUTER / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN STABAT KELURAHAN PERDAMAIAN SEKSI PEMERINTAHAN UMUM

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	6
212	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN SIRAPIT SEKSI TATA PEMERINTAHAN
213	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BIDANG ASSET DAERAH SUB BIDANG PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
214	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 KOMPUTER / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN BATANG SERANGAN KELURAHAN BATANG SERANGAN SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
215	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN BATANG SERANGAN SEKSI TATA PEMERINTAHAN
216	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER / S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 ILMU KOMUNIKASI	2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG BIDANG BINA MARGA
217	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN WAMPU SEKSI TATA PEMERINTAHAN
218	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM
219	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER / S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN BESITANG KELURAHAN KAMPUNG LAMA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
220	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN TANJUNG PURA KELURAHAN PEKAN TANJUNG PURA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
221	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL POLITIK	1	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BAGIAN UMUM
222	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 KOMPUTER	1	KECAMATAN BINJAI KELURAHAN KWALA BEGUMIT SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
223	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN SAWIT SEBERANG SEKSI TATA PEMERINTAHAN
224	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN PEMATANG JAYA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
225	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KECAMATAN BABALAN KELURAHAN BRANDAN TIMUR SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
226	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN SAWIT SEBERANG SEKRETARIAT KECAMATAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
227	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	KECAMATAN BINJAI SEKSI TATA PEMERINTAHAN
228	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	2	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
229	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM
230	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN HUKUM
231	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	KECAMATAN KUALA KELURAHAN BELA RAKYAT SEKRETARIAT KELURAHAN
232	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN STABAT KELURAHAN KWALA BINGAI SEKRETARIAT KELURAHAN
233	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN SEI BINGAI KELURAHAN NAMU UKUR SELATAN SEKRETARIAT KELURAHAN
234	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	KECAMATAN SECANGGANG KELURAHAN HINAI KIRI SEKRETARIAT KELURAHAN
235	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	KECAMATAN BAHOROK SEKRETARIAT KECAMATAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
236	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN BRANDAN BARAT KELURAHAN TANGKAHAN DURIAN SEKRETARIAT KELURAHAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	6
237	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN BESITANG KELURAHAN KAMPUNG LAMA SEKRETARIAT KELURAHAN
238	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	KECAMATAN HINAI SEKRETARIAT KECAMATAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
239	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
240	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BAGIAN UMUM
241	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSAMAAN SLTA	1	KECAMATAN GEBANG SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
242	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN BESITANG KELURAHAN PEKAN BESITANG SEKRETARIAT KELURAHAN
243	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN BABALAN KELURAHAN BRANDAN TIMUR BARU SEKRETARIAT KELURAHAN
244	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN SAWIT SEBERANG KELURAHAN SAWIT SEBERANG SEKRETARIAT KELURAHAN
245	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS SOSIAL SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN INFORMASI DATA
246	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
247	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN STABAT KELURAHAN PERDAMAIAN SEKRETARIAT KELURAHAN
248	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS KESEHATAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN INFORMASI
249	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN SECANGGANG SEKRETARIAT KECAMATAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
250	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BIDANG DESTINASI SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN
251	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN PADANG TUALANG KELURAHAN TANJUNG SELAMAT SEKRETARIAT KELURAHAN
252	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN BRANDAN BARAT KELURAHAN PANGKALAN BATU SEKRETARIAT KELURAHAN
253	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN SALAPIAN KELURAHAN TANJUNG LANGKAT SEKRETARIAT KELURAHAN
254	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM
255	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	KECAMATAN SEI LEPAN KELURAHAN SEI BILAH TIMUR SEKRETARIAT KELURAHAN
256	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSAMAAN SLTA	3	SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM
257	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN BATANG SERANGAN KELURAHAN BATANG SERANGAN SEKRETARIAT KELURAHAN
258	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PERHUBUNGAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM
259	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSAMAAN SLTA	1	KECAMATAN STABAT SEKSI TATA PEMERINTAHAN
260	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN SEI LEPAN KELURAHAN SEI BILAH TIMUR SEKRETARIAT KELURAHAN
261	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	KECAMATAN SELESAI SEKRETARIAT KECAMATAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
262	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN BRANDAN BARAT SEKSI TATA PEMERINTAHAN
263	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PENDIDIKAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
264	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN WAMPU SEKSI TATA PEMERINTAHAN
265	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN ORGANISASI

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	6
266	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN TANJUNG PURA KELURAHAN PEKAN TANJUNG PURA SEKRETARIAT KELURAHAN
267	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN SELESAI KELURAHAN PEKAN SELESAI SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
268	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN TANJUNG PURA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
269	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	KECAMATAN BAHOROK KELURAHAN PEKAN BAHOROK SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
270	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN BINJAI KELURAHAN KWALA BEGUMIT SEKRETARIAT KELURAHAN
271	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN SELESAI KELURAHAN PEKAN SELESAI SEKRETARIAT KELURAHAN
272	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN GEBANG KELURAHAN PEKAN GEBANG SEKRETARIAT KELURAHAN
273	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN BESITANG KELURAHAN BUKIT KUBU SEKRETARIAT KELURAHAN
274	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN BATANG SERANGAN SEKSI TATA PEMERINTAHAN
275	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN SIRAPIT SEKRETARIAT KECAMATAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
276	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSAMAAN SLTA	1	KECAMATAN STABAT KELURAHAN PAYA MABAR SEKRETARIAT KELURAHAN
277	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
278	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKRETARIAT SUBBAGIAN UMUM
279	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN INFORMASI PUBLIK
280	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN SEI BINGAI SEKRETARIAT KECAMATAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
281	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSAMAAN SLTA	1	KECAMATAN STABAT KELURAHAN SIDOMULYO SEKRETARIAT KELURAHAN
282	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN WAMPU KELURAHAN BINGAI SEKRETARIAT KELURAHAN
283	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	BADAN PENDAPATAN DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM
284	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN BESITANG SEKRETARIAT KECAMATAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
285	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN ASSET
286	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
287	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN KUTAMBARU SEKRETARIAT KECAMATAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
288	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN BABALAN KELURAHAN BRANDAN TIMUR SEKRETARIAT KELURAHAN
289	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN PANGKALAN SUSU SEKRETARIAT KECAMATAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
290	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEUANGAN
291	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN BABALAN KELURAHAN PELAWI UTARA SEKRETARIAT KELURAHAN
292	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	DINAS KETENAGAKERJAAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
293	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN BABALAN KELURAHAN BRANDAN BARAT SEKRETARIAT KELURAHAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	6
294	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	KECAMATAN KUALA KELURAHAN PEKAN KUALA SEKRETARIAT KELURAHAN
295	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM
296	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	KECAMATAN HINAI KELURAHAN KEBUN LADA SEKRETARIAT KELURAHAN
297	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	INSPEKTORAT SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM
298	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN SEI LEPAN SEKRETARIAT KECAMATAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
299	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS KOPERASI SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
300	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN STABAT KELURAHAN DENDANG SEKRETARIAT KELURAHAN
301	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN PADANG TUALANG SEKRETARIAT KECAMATAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
302	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN PEMATANG JAYA SEKRETARIAT KECAMATAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
303	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KECAMATAN STABAT KELURAHAN STABAT BARU SEKRETARIAT KELURAHAN
304	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN / D-III KOMPUTER / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS	1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, ADVOKASI DAN PENGGERAKAN
305	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III KOMPUTER / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS	1	DINAS SOSIAL BIDANG REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL
306	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN / D-III KOMPUTER / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN	1	DINAS KOPERASI BIDANG PENGAWASAN
307	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III KOMPUTER / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN
308	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III KOMPUTER / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN	2	DINAS PERHUBUNGAN BIDANG ANGKUTAN DARAT DAN LALU LINTAS SEKSI ANGKUTAN DARAT
309	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III KOMPUTER / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG BIDANG CIPTA KARYA
310	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III KOMPUTER / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS	1	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
311	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III KOMPUTER / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
312	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III KOMPUTER / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS	1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN BIDANG REHABILITASI / PENGEMBANGAN LAHAN DAN PENGENDALIAN OPT

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	6
313	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN / D-III KOMPUTER / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS	2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
314	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN / D-III KOMPUTER / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS	2	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BIDANG PEMBERDAYAAN POTENSI DESA DAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN
315	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN / D-III KOMPUTER / D-III ADMINISTRASI	1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
316	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN / D-III KOMPUTER / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS	1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM
317	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III KOMPUTER / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS	1	BADAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN SUB BIDANG VERIFIKASI DAN KEBERATAN
318	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III KOMPUTER / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS	2	SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM
319	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III KOMPUTER / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS	1	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN BIDANG PERPUSTAKAAN
320	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN / D-III KOMPUTER / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS	2	DINAS KESEHATAN BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
321	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III KOMPUTER / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS	1	DINAS PENDIDIKAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
322	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III KOMPUTER / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN	1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA BIDANG PROGRAM SARANA DAN PRASARANA
323	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN / D-III KOMPUTER / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS	1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BIDANG PERBENDAHARAAN SUB BIDANG BELANJA LANGSUNG
324	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PERSAMAAN SD (PAKET A) / SD/SEDERAJAT	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
325	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PERSAMAAN SD (PAKET A) / SD/SEDERAJAT	1	DINAS PENDIDIKAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
326	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PERSAMAAN SD (PAKET A) / SD/SEDERAJAT	4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM
327	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PERSAMAAN SD (PAKET A) / SD/SEDERAJAT	3	BADAN PENDAPATAN DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM
328	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PERSAMAAN SD (PAKET A) / SD/SEDERAJAT	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
329	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PERSAMAAN SD (PAKET A) / SD/SEDERAJAT	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
330	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PERSAMAAN SD (PAKET A) / SD/SEDERAJAT	1	DINAS PERHUBUNGAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	6
331	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SD/SEDERAJAT / PERSAMAAN SD (PAKET A)	2	DINAS KESEHATAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN INFORMASI
332	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PERSAMAAN SD (PAKET A) / SD/SEDERAJAT	1	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM
333	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PERSAMAAN SD (PAKET A) / SD/SEDERAJAT	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
334	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PERSAMAAN SD (PAKET A) / SD/SEDERAJAT	2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BAGIAN UMUM SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
335	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PERSAMAAN SD (PAKET A) / SD/SEDERAJAT	1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM
336	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PERSAMAAN SD (PAKET A) / SD/SEDERAJAT	4	SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM
337	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PERSAMAAN SD (PAKET A) / SD/SEDERAJAT	1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
338	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PEMULA	SMK TEKNIK	2	DINAS PERHUBUNGAN BIDANG REKAYASA LALU LINTAS, SARANA DAN PRASARANA
339	PRANATA TRANTIBUM	SLTA/SMA SEDERAJAT	20	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN DAERAH SEKSI PENEGAKAN PERATURAN
JUMLAH			1400	

Pj. BUPATI LANGKAT



M. FAISAL HASRIMY

Tembusan :

- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta
- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
- Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan

**DESKRIPSI PEKERJAAN DAN RENTANG PENGHASILAN
UNTUK SETIAP FORMASI JABATAN**

NO	JABATAN	RENTANG PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN
		MINIMAL	MAKSIMAL	
1	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	<p>A. MENYUSUN KURIKULUM PEMBELAJARAN PADA SATUAN PENDIDIKAN; B. MENYUSUN SILABUS PEMBELAJARAN; C. MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN; D. MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN; E. MENYUSUN ALAT UKUR/SOAL SESUAI MATA PELAJARAN; F. MENILAI DAN MENGEVALUASI PROSES DAN HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN YANG DIAMPUNYA; G. MENGANALISIS HASIL PENILAIAN PEMBELAJARAN; H. MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN/PERBAIKAN DAN PENGAYAAN DENGAN MEMANFAATKAN HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI; I. MENJADI PENGAWAS PENILAIAN DAN EVALUASI TERHADAP PROSES DAN HASIL BELAJAR TINGKAT SEKOLAH DAN NASIONAL; J. MEMBIMBING GURU PEMULA DALAM PROGRAM INDUKSI; K. MEMBIMBING SISWA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PROSES PEMBELAJARAN; L. MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN DIRI; M. MELAKSANAKAN PUBLIKASI ILMIAH; DAN N. MEMBUAT KARYA INOVATIF.</p>
2	GURU AHLI PERTAMA - GURU TIK	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	
3	GURU AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	
4	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-SD	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	
5	GURU AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	
6	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPS	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	
7	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	
8	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	
9	GURU AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEV	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	
10	GURU AHLI PERTAMA - GURU PPKN	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	
11	GURU AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSEL	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	
12	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPA	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	
13	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-TK	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	
14	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	
15	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	
16	GURU AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	
17	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	MELAKSANAKAN ANALISIS KEBIJAKAN DI BIDANG ADMINISTRASI PELAYANAN, PERIJINAN, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
18	APOTEKER AHLI PERTAMA	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	MELAKSANAKAN PENYIAPAN PEKERJAAN KEFARMASIAN YANG MELIPUTI PENYIAPAN DATA UNTUK PENYIAPAN PERANGKAT LUNAK, PENYIAPAN PENGADAAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA, SERTA PENYIAPAN PELAYANAN KEFARMASIAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU AGAR TERLAKSANYA PELAYANAN KEFARMASIAN
19	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER ADALAH JABATAN YANG MEMPUNYAI RUANG LINGKUP TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG UNTUK MELAKSANAKAN PENYIAPAN PEKERJAAN KEFARMASIAN PADA UNIT PELAYANAN KESEHATAN YANG DIDUDUKI OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN YANG DIBERIKAN SECARA PENUH OLEH PEJABAT YANG BERWENANG
20	BIDAN TERAMPIL	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	MEMBERIKAN PELAYANAN KEBIDANAN KEPADA IBU, ANAK, REMAJA, DAN PELAYANAN KB SERTA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT SESUATU DENGAN PROSEDUR YANG BERLAKU

NO	JABATAN	RENTANG PENGHASILAN		DESKIPSI PEKERJAAN
		MINIMAL	MAKSIMAL	
21	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS JANTUN	Rp 3.500.000	Rp 4.500.000	MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN YG MELIPUTI PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF DAN REHABILITATIF UNTUK MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT, SERTA MEMBINA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM RANGKA KEMANDIRIAN DI BIDANG KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT
22	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN YG MELIPUTI PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF DAN REHABILITATIF UNTUK MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT, SERTA MEMBINA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM RANGKA KEMANDIRIAN DI BIDANG KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT
23	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	MELAKSANAKAN PENGKAJIAN TERHADAP OBJEK KERJA SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN KETENTUAN YANG BERLAKU GUNA MENUNJANG KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS
24	NUTRISIONIS TERAMPIL	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PERBAIKAN GIZI PADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
25	PERAWAT AHLI PERTAMA	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN KEPERAWATAN YANG MELIPUTI ASUHAN KEPERAWATAN, DAN PENGELOLAAN KEPERAWATAN
26	PERAWAT TERAMPIL	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	MELAKUKAN ASUHAN KEPERAWATAN SEDERHANA TERHADAP PASIEN SESUAI DENGAN PEDOMAN DAN ARAHAN PIMPINAN UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN KEPERAWATAN
27	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN REKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN YANG MELIPUTI PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN PELAPORAN DAN EVALUASI
28	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN LABORATORIUM UNTUK PEMERIKSAAN DARAH, URINE, DAN PEMERIKSAAN DAHAK SESUAI DENGAN PROSEDUR.
29	RADIOGRAFER TERAMPIL	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN RADIOLOGI YG MELIPUTI PERSIAPAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN & EVALUASI
30	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	MELAKSANAKAN KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN, PENGETAHUAN, PENERAPAN KONSEP DAN TEORI, ILMU DAN SENI UNTUK PEMECAHAN MASALAH DAN PROSES PEMBELAJARAN DENGAN CARA YANG SISTEMATIS DI BIDANG PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT/ PROMOSI KESEHATAN.
31	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	JABATAN FUNGSIONAL TENAGA SANITASI LINGKUNGAN ADALAH JABATAN YANG MEMPUNYAI RUANG LINGKUP TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN LINGKUNGAN PADA INSTANSI PEMERINTAH.
32	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT YANG MELIPUTI PERSIAPAN PELAYANAN, PELAKSANAAN PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
33	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	MELAKUKAN KEGIATAN PENGOPERASIAN LAYANAN TEKNIS
34	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	MELAKUKAN KEGIATAN TATA KELOLA LAYANAN TEKNIS
35	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	MELAKSANAKAN KEGIATAN DUKUNGAN ADMINISTRASI PERKANTORAN, PEMERINTAHAN, DAN PELAYANAN PUBLIK (CUSTOMER SERVICE).
36	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN LAYANAN TEKNIS
37	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN LAYANAN UMUM

NO	JABATAN	RENTANG PENGHASILAN		DESKIPSI PEKERJAAN
		MINIMAL	MAKSIMAL	
38	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PEMULA	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	TUGAS JABATAN MELAKSANAKAN PEMASTIAN KELAIKAN JALAN KENDARAAN YANG MELIPUTI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR, RANCANG BANGUN DAN REKAYASA KENDARAAN BERMOTOR DAN PERAWATAN SERTA PERBAIKAN PERALATAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
39	PRANATA TRANTIBUM	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	MELAKUKAN KEGIATAN YANG MELIPUTI PENGAMANAN DAN PENERTIBAN.

Perihal : Permohonan untuk diangkat menjadi
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK)

Stabat,

2024

Kepada Yth,
Bapak Bupati Langkat
di-
Stabat

Dengan hormat,

Berdasarkan Pengumuman Bupati Langkat Nomor : 800.1.1.1-2157/BKD/2024 tanggal 30 September 2024 Tentang Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (lengkap sesuai Ijazah)
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat / Tanggal Lahir : (lengkap sesuai Ijazah)
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan / Jurusan :
Jabatan yang dilamar :
Unit Penempatan :
Alamat Lengkap : (lengkap sesuai KTP)
Desa/Kelurahan : , Kecamatan:.....
Kabupaten/Kota : , Provinsi :.....
Telepon/HP :
E-mail :

dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, kiranya dapat menerima saya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini turut saya lampirkan syarat-syarat kelengkapan berkas sebagai berikut :

1. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk;
2. Scan Asli Ijazah Sesuai Kualifikasi Pendidikan Formasi Jabatan;
3. Scan Asli Transkrip Nilai;
4. Scan Asli Surat pernyataan 5 poin dibubuhi meterai 10.000.
5. Pasfoto terbaru berlatar belakang warna merah;
6. Scan Asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja;
7. Scan Asli Surat Keterangan Aktif Bekerja;
8. Scan Asli Surat keterangan disabilitas (bagi pelamar disabilitas)

Demikian permohonan ini saya ajukan dengan harapan semoga Bapak dapat mempertimbangkannya, dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Meterai 10.000

Ket.

(Nama Lengkap)

*Surat lamaran ditulis tangan rapi dengan tinta warna hitam
Atau diketik komputer*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Langkat, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai 10.000

.....

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama :
NIK :
Tempat, Tgl Lahir :
Pendidikan :
Jabatan :
Unit Kerja

Adalah benar telah bekerja di jabatan sebagai dan telah bekerja selama tahun bulan terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal dan bekerja dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya, dan jika kemudian hari surat keterangan ini terbukti tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka saya bersedia diproses secara hukum yang berlaku.

Stabat,2024
Kepala Unit Kerja

Nama
NIP.....

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama :
NIK :
Tempat, Tgl Lahir :
Pendidikan :
Jabatan :
Unit Kerja

Telah aktif bekerja di jabatan sebagai dan telah bekerja selama tahun bulan terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal dan bekerja dengan baik.

No	Nomor Surat	Nama dan Jabatan Penanda Tangan	Jabatan	Tahun Mulai Tugas	Tahun Selesai Tugas

Demikian surat keterangan aktif bertugas ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya, dan jika kemudian hari surat keterangan ini terbukti tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka saya bersedia diproses secara hukum yang berlaku.

Stabat,2024
Kepala Unit Kerja

Nama
NIP.....